

# Pembangunan Berkelanjutan Suatu Alternatif Pembangunan Indonesia Ke Depan

Herawati

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"  
Jl. Timoho 317 Yogyakarta 55225 Telp. 0274-561971

## Abstract

*The Indonesian government's policy in the implementation of the economic growth-oriented development has resulted in two sides of the same coin. On the one hand, it has brought about progress, development, and higher national income. On the other hand, it has raised many problems such as economic and social inequality, environmental damages, which have potential to create environmental disasters that destroy the resources of society's life, health problems, destruction of traditional economy, marginalization of the local culture, violation and abuse, and even the declining level of social welfare which eventually lead to justice and sustainability problems in the future. To obtain better quality of life and maintainance of the environment and ecosystems, the government needs to develop and adopt environmentally-friendly development strategy. Sustainable development is a development alternative that maintains economic sustainability, environmental conservation, and social welfare and justice. Based on literature study, this paper proposes an alternative environmentally friendly development strategy that does not destroy the ecology and that improves the economic development and the improvement of life quality through sustainable development. Sustainable development requires the integration process of the economy and ecology based on the partnership and participation of the developmental agents to optimally manage available resources to promote social justice and welfare. The developmental process should promote human dignity as the essence of development is the promotion of human dignity as reflected in better life quality, welfare and justice.*

**Keywords:** *sustainable development, sustainably economic, preservation life environment, social welfare and justice.*

## Abstrak

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi disatu sisi membawa perkembangan, kemajuan dan memberi keuntungan pada pendapatan negara. Disisi lain telah banyak menimbulkan persoalan, ketimpangan ekonomi dan sosial, kerusakan lingkungan, yang berpotensi menciptakan bencana lingkungan yang dapat menghancurkan sumber-sumber kehidupan masyarakat, persoalan kesehatan, kehancuran ekonomi tradisional, peminggiran budaya lokal, terjadinya pelanggaran dan kekerasan, dan bahkan menyebabkan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat hingga akhirnya bermuara pada persoalan keadilan dan keberlanjutan masa depan. Untuk memperoleh kualitas hidup yang lebih baik dan terpeliharanya lingkungan serta ekosistem perlu dikembangkan pola dan strategi pembangunan dengan pengembangan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan merupakan alternatif pembangunan yang menjaga keberlanjutan ekonomi, pelestarian lingkungan, kesejahteraan dan keadilan sosial. Tulisan ini berdasarkan kajian pustaka untuk mencari alternatif

pembangunan ramah lingkungan yang tidak merusak lingkungan hidup, sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan tingkat kehidupan melalui pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan memerlukan proses integrasi ekonomi dan ekologi yang bertumpu pada kemitraan dan partisipasi para pelaku pembangunan dalam mengelola sumberdaya seoptimal mungkin. Mengusahakan agar hasil pembangunan terbagi merata dengan adil pada berbagai kelompok dan lapisan masyarakat serta antar generasi. Proses pembangunan haruslah memajukan martabat manusia tujuan setiap pembangunan adalah demi kemajuan yang terus menerus secara berkelanjutan untuk kesejahteraan manusia secara adil dan merata.

**Kata-kata Kunci:** pembangunan berkelanjutan, sustainably ekonomi, pelestarian lingkungan hidup, kesejahteraan dan keadilan sosial

## **Pendahuluan**

Selama pemerintah Orde Baru berkuasa di Indonesia, kata pembangunan menjadi semboyan mereka. Selain sebagai semboyan, kata pembangunan juga menjadi nama bagi pemerintahan Orde Baru. Hal itu bisa dilihat bahwa nama kabinet sejak pemerintahan Orde Baru selalu dikaitkan dengan kata pembangunan. Konsep pembangunan mempunyai banyak perspektif. Pembangunan dimaknai sebagai pertumbuhan, perubahan sosial, modernisasi. Oleh karena itu makna pembangunan bergantung pada konteks siapa yang menggunakan dan untuk kepentingan apa. Meski memiliki berbagai penafsiran, tren utama pemahaman pembangunan dalam konteks Orde Baru adalah kemajuan yang dicapai di bidang ekonomi. Dalam model pembangunan seperti ini, pembangunan identik dengan proses modernisasi. Melalui modernisasi produktivitas nasional diharapkan dapat lebih meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya dapat dicapai. Sehu-

bungan dengan hal tersebut Pemerintah Orde Baru mulai membangun demokrasi ekonomi dengan membuka pintu modal asing dan menggali sumberdaya alam seluas-luasnya (Arif S, 2000: 215).

Untuk mendukung kegiatan pembangunan ekonomi, disusunlah berbagai kebijakan demi terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan jumlah investasi. Dalam hal pemanfaatan modal, maka dibuatlah Kebijakan Pintu Terbuka yang ditandai dengan terbitnya UU. No.1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU. NO. 6/1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). 2) undang-undang ini menandai dibukanya secara luas peluang bagi pihak swasta untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan UU No.1 tahun 1967 secara khusus menandai dibukanya peluang bagi investasi asing di Indonesia (Dwiyanto dalam Soemarjono, 2000: 24). Adanya kebijakan tentang permodalan tersebut membuat investasi asing berdatangan ke Indonesia dan bersamaan dengan hal itu pada tahun 1970

terjadi *oil boom*, Indonesia menikmati rezeki mendadak atau *windfall profits* dari kenaikan harga minyak dunia. Namun pada dekade 1980-an harga minyak dunia merosot, Pemerintah Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan minyak sebagai devisa utama, sehingga perlu memacu sumber pendapatan dari sektor lain. Indonesia mengandalkan devisa dari eksploitasi sumber daya alam yaitu ekspor non migas yang didominasi oleh hasil hutan dari tipe hutan hujan tropika basah (*tropical rain forest*) yang kaya keanekaragaman hayati dan eksploitasi tambang (Baiquni dkk. 2003: 29). Memang tidak dapat disangkal bahwa model pembangunan seperti ini telah mengantarkan Indonesia pada pertumbuhan ekonomi yang amat tinggi dan Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami peningkatan pada dekade 1980-an sampai beberapa tahun sebelum krisis. Menurut laporan Bank Dunia (2007: 8) pada masa pemerintahan Orde Baru, selama tiga dekade, mulai tahun 1968 rata-rata Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh sebesar 7,4 persen per tahun. Hasilnya pendapatan per kapita Indonesia tahun 1997 mencapai 906 dolar AS, lebih dari empat kali lipat pendapatan tahun 1968 (Indikator Pembangunan Dunia). Namun keberhasilan paradigma pertumbuhan mencapai pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seringkali harus dicapai melalui pengorbanan (*at the expense of*) yang berupa deteriorasi ekologis baik yang berujud kerusakan tanah (*soil depletion*), penyusutan sumber-

daya alam yang tidak dapat diperbaharui lagi (*non-renewable*), desertifikasi dan sebagainya (Tjokrowinoto, 1999: 14).

Berkait dengan hal di atas, Fakih Mansour (2002: 70) menyatakan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ternyata masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dengan kata lain, pembangunan telah gagal memenuhi janjinya untuk mensejahterakan masyarakat, yang terjadi sebaliknya, pembangunan telah membawa dampak negatif, diantaranya pembangunan telah melanggengkan pengangguran, menumbuhkan ketidakmerataan, dan menaikkan kemiskinan absolut. Hal tersebut merupakan bukti kegagalan model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya menjadi diskursus Orde Baru, kenyataannya tidak menjamin pemerataan seperti yang diestimasikan. Pertumbuhan ekonomi nasional tinggi diasumsikan bisa segera menciptakan pemerataan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tak kunjung terwujud. Justru yang terjadi adalah adanya: a) *Polarisasi Ekonomi*, Polarisasi kepemilikan ekonomi antara kaum yang bermodal besar dan yang bermodal kecil semakin besar. Akibatnya yang kaya semakin kaya, sementara yang miskin bertambah miskin. Ketimpangan regional mulai nampak begitu pembangunan ekonomi yang pesat telah berjalan di Indonesia dan terjadi ketidakadilan dalam pembagian kue pembangunan dari pusat terhadap daerah, yang kemudian memicu ketidakpuasan daerah terhadap pusat; b)

*Kerusakan Lingkungan*, Pembangunan yang pesat selama pemerintahan Orde Baru ternyata menyisakan banyak persoalan. Pembangunan terancam tidak berlanjut karena makin rusaknya alam.

Kerusakan dan pencemaran lingkungan menurut J. Barros dan J.M. Johnson dalam Absori (2006: 40) erat kaitannya dengan aktivitas pembangunan yang dilakukan manusia, antara lain disebabkan, 1), kegiatan-kegiatan industri, dalam bentuk limbah, zat-zat buangan yang berbahaya seperti logam berat, zat radio aktif dan lain-lain. 2), kegiatan pertambangan, berupa terjadinya kerusakan instalasi, kebocoran, pencemaran buangan penambangan, pencemaran udara dan rusaknya lahan bekas pertambangan. 3), kegiatan transportasi, berupa kepulan asap, naiknya suhu udara kota, kebisingan kendaraan bermotor, tumpahan bahan bakar, berupa minyak bumi dari kapal tanker. 4), kegiatan pertanian, terutama akibat dari residu pemakaian zat-zat kimia untuk memberantas serangga/tumbuhan pengganggu, seperti insektisida, pestisida, herbisida, fungisida dan juga pemakaian pupuk organik.

Dampak dari pencemaran dan perusakan lingkungan yang amat mencemaskan dan menakutkan akibat aktivitas pembangunan sosial ekonomi berorientasi pasar dan kebutuhan dalam negeri serta industrialisasi dapat berupa: 1) *Hujan asam*, disebabkan karena sektor industri dan transportasi dalam aktivitasnya menggunakan bahan bakar minyak dan batu bara yang dapat menghasilkan gas buang ke udara yang dapat mengaki-

batkan kerusakan dan kematian organisme hidup; 2) *Kerusakan hutan*, hutan sebagai warisan bagi generasi mendatang mengalami pengurangan jumlah secara drastis akibat penambangan dan penebangan kayu untuk bahan baku perindustrian; 3) *Pemanasan global*, akibat kerusakan hutan akan mempercepat pemanasan global. Dampak dari pemanasan global adalah terjadinya perubahan iklim secara global dan kenaikan permukaan laut; 4) *Lubang ozon*, penyebab terjadinya adalah zat kimia semacam klorofurkarbon (CFC), yang merupakan zat buatan manusia yang sangat berguna dalam kehidupan manusia sehari-hari, seperti untuk lemari es dan AC (Absori, 2006: 39).

Perindustrian yang menjadi aspek penting peningkatan pertumbuhan ekonomi “berperan” menimbulkan pencemaran atau polusi. Penggunaan zat kimia seperti, sianida, dan merkuri pada industri ekstraktif serta pestisida dalam Revolusi Hijau menyebabkan pencemaran air permukaan, pencemaran air tanah, pencemaran udara, penurunan tingkat kesuburan tanah, kerusakan flora dan fauna, yang pada gilirannya berakibat pada penurunan kualitas lingkungan pada tingkat lokal dan nasional. Dengan laju kerusakan lingkungan yang terus meningkat, diperkirakan bencana hidrometeorologi di Indonesia akan terus meningkat. Frekuensi bencana terkait iklim dan cuaca di Indonesia terus meningkat dalam 10 tahun terakhir. Dari total bencana, hampir 79 persen merupakan bencana hidrometeorologi yaitu bencana

yang terkait cuaca dan iklim. Bencana ini antara lain banjir, kekeringan, tanah longsor, puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, serta gelombang pasang. Perubahan iklim kerap menjadi kambing hitamnya. Namun, kekeliruan pengelolaan lingkungan sebenarnya berperan besar terhadap peningkatan frekuensi bencana. Berkait dengan hal tersebut Rizaldi Boer menegaskan, perubahan iklim ekstrem menyebabkan hilangnya produksi padi di Indonesia pada periode 1981-1990 sekitar 100.000 ton per tahun per kabupaten. Pada kurun 1991-2000 gagal panen meningkat menjadi 300.000 ton, diramalkan pada tahun 2050 terjadi defisit gabah kering sebesar 60 juta ton di Indonesia. Jika bencana ini tidak diantisipasi secara menyeluruh, bukan hanya bencana alam yang terjadi, tetapi juga bencana ekonomi dan sosial. Oleh karena itu harus ada perubahan fundamental dalam pengelolaan lingkungan (*Kompas*, 4 Mei 2011).

Kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi disatu sisi membawa perkembangan, kemajuan dan memberi keuntungan pada pendapatan negara, disisi lain telah banyak menimbulkan persoalan antara lain: ketimpangan ekonomi dan sosial, kerusakan pada kemampuan fungsi hutan, yang dalam jangka panjang berpotensi menciptakan bencana lingkungan yang dapat menghancurkan sumber-sumber kehidupan masyarakat, persoalan kesehatan, kehancuran ekonomi tradisional, peminggiran budaya lokal, terjadinya pelanggaran dan kekerasan,

dan bahkan menyebabkan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat hingga akhirnya bermuara pada persoalan keadilan dan keberlanjutan masa depan. Sehubungan dengan hal tersebut muncul kekhawatiran akan datangnya bencana ekologi yang dapat menyebabkan daya dukung kehidupan hancur dan sulit dipulihkan lagi. Suatu bencana yang secara sistematis mengurangi kemampuan hidup generasi mendatang akibat keserakahan segelintir generasi saat ini. Karena itu menurut Soemarwoto, (2004: 9) jika kebijakan pembangunan dan kelakuan kita terhadap lingkungan hidup tidak berubah, ada bahaya riil yang menghadang bahwa Indonesia akan mengikuti sejarah negara Mezopotamia, Maya dan Aztek yang punah dari permukaan bumi oleh bencana lingkungan hidup yang mereka buat sendiri.

Memperhatikan uraian di atas nampak bahwa pembangunan dengan orientasi pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan penurunan kesejahteraan pada masyarakat. Akan teruskah kita mengikut pola pembangunan yang merusak lingkungan hidup? Adakah alternatif pembangunan untuk menghindari kerusakan lingkungan? Ke depan untuk memperoleh kualitas hidup yang baik dan terpeliharanya lingkungan serta ekosistem maka harus dikembangkan pola pembangunan dengan pengembangan lingkungan. Berangkat dari keprihatinan ini maka perlu ada pengkajian ulang dalam paradigma pembangunan, dari paradigma yang mengandalkan strategi pertum-



buhan (ekonomi) menuju pembangunan berkelanjutan. Salah satu usaha penting adalah pemikiran baru mengenai integrasi ekonomi dan ekologi menuju pembangunan berkelanjutan (Baiquni, 2003: 200). Tulisan ini merupakan hasil kajian pustaka untuk mencari alternatif pembangunan ramah lingkungan yang tidak merusak lingkungan hidup, sekaligus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan tingkat kehidupan melalui pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan metode analisis. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi saat ini tanpa mengurangi potensi kebutuhan aspirasi manusia masa datang dengan metode analisis.

### **Pembangunan Ekonomi dan Deplisi Sumberdaya Alam**

Sebagaimana disinggung di atas bahwa pembangunan dengan mengedepankan pertumbuhan ekonomi, merupakan penyebab paling utama yang mendorong semakin tingginya kerusakan lingkungan dalam beberapa dekade terakhir. Meski demikian berbicara masalah kerusakan lingkungan tentunya tidak bisa mengabaikan masalah sosial-politik. Seperti halnya industrialisasi yang dikembangkan berkisar pada eksploitasi sumberdaya alam. Model pembangunan ekonomi dengan pengembangan sektor industri ternyata tidak diikuti dengan kemampuan sektor itu dalam menyediakan kesempatan kerja bagi penduduk yang

sektornya (pertanian) digantikan oleh industri.

Adanya perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralisasi dengan otonomi daerah telah mendorong Pemerintah Daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya melalui eksploitasi sumberdaya alam. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.1 tahun 2004, Perpu yang mengatur perubahan UU No. 41/1999 tentang kehutanan, ini akan dijadikan payung hukum bagi perusahaan-perusahaan yang operasinya terganjal oleh UU No. 41/1999 tentang kehutanan. Dengan dalih untuk menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi, pemerintah rela mengorbankan kawasan hutan lindung untuk dieksploitasi. Sepanjang otonomi daerah berlaku, dengan dalih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah daerah banyak memberi ijin perusahaan industri ekstraktif untuk beroperasi dan penebangan hutan, bahkan di kawasan Taman Nasional dan di lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan warisan dunia serta di hutan lindung. Hingga tahun 2006, setidaknya 2.559 ijin dikeluarkan pemerintah Indonesia, yang meliputi lebih 30 % daratan negeri. Hal tersebut dapat mengancam 7 juta penduduk, dimana sekitar 30 persen masih hidup di bawah garis kemiskinan. Selama ini jutaan penduduk itu banyak menggantungkan hidupnya dari hutan dengan segala peranan ekologis yang dimiliki, sumber keanekaragaman hayati, daerah tangkapan air, pencegah erosi

dan tanah longsor, dan tentu saja sumber ekonomi (Aminudin, dkk: 2007: 57).

Menurut Walhi (2004: 9) hutan Indonesia saat ini kondisinya dalam keadaan kritis, tiap menit hutan Indonesia berkurang seluas 3 kali lapangan sepak bola. Luas keseluruhan hutan Indonesia saat ini tersisa sekitar 98 juta hektar dan setengahnya telah mengalami degradasi akibat kegiatan manusia. Besarnya degradasi hutan pada 10 tahun terakhir mencapai 2 juta hektar pertahun dengan akumulasi kerusakan hutan mencapai 43 juta hektar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan hutan antara lain penebangan hutan, dan berkembangnya industri ekstraktif. Sehubungan dengan hal tersebut Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan menyatakan, dari 130 juta hektar hutan di Indonesia hanya 43 juta hektar yang kondisinya masih baik yakni dalam kondisi subur dan lebat. Selebihnya ada yang sudah beralih fungsi menjadi pertambangan ada pula yang bekas hak penguasaan hutan (HPH). Yang memprihatinkan jumlah hutan yang benar-benar sudah rusak mencapai 40 juta hektar dari keseluruhan hutan Indonesia (*Kompas*, 8 Juni 2010). Laju kerusakan hutan di Indonesia menurut Sutopo jauh lebih tinggi dibandingkan kemampuan pemerintah dalam merehabilitasi lahan, misalnya selama 2003-2006, laju kerusakan hutan 1,17 hektar per tahun sedangkan kemampuan pemerintah merehabilitasi hutan dan lahan setiap tahun hanya sekitar 450.000 hektar. Artinya terjadi defisit 550.000 hektar per tahun (*Kompas*, 4 Mei 2011). Sementara Baoed dalam

Syahrin (2005: 41) menyatakan bahwa laju penebangan hutan di Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di dunia dengan kisaran antara 1,6 hingga 2,1 juta hektar per tahun. Sekitar 43 juta hektar telah terdegradasi dan akibatnya 294 spesies flora dan fauna hilang. Kondisi sektor kehutanan tersebut mempercontohkan untuk masyarakat dampak pembangunan yang tidak berkelanjutan dimana penekanan diletakkan hanya pada faktor ekonomi, dengan mengorbankan kepentingan sosial dan ekologis.

Dari sudut hukum, pembangunan industri ekstraktif di hutan lindung merupakan tindak kriminal karena telah melanggar ketentuan di beberapa peraturan perundang-undangan lingkungan yaitu, UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati & Ekosistemnya, juga UU No 41/1999 tentang Kehutanan. Di dalam pasal 19 ayat (1) UU No 5 Tahun 1990 disebutkan bahwa kegiatan yang dilarang adalah "Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam". Yang dimaksud perubahan terhadap keutuhan suaka alam adalah melakukan perusakan keutuhan kawasan dan ekosistemnya, perburuan satwa yang berada dalam kawasan, dan memasukkan jenis-jenis bukan asli (Aminudin, dkk: 2006: 46). Kegiatan tersebut juga melanggar pasal 38 ayat (3) UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang secara tegas melarang kegiatan industri ekstraktif di kawasan hutan lindung karena mengingat pentingnya fungsi kawasan hutan lindung terhadap daya dukung ekosis-

tem, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan diancam hukuman pidana kejahatan paling lama 10 tahun di penjara. Kerusakan hutan akan menghancurkan sumber-sumber kehidupan masyarakat. Kehancuran berawal dari rusaknya daerah-daerah resapan air sehingga mengganggu keseimbangan suplai air yang merupakan faktor penting bagi kehidupan binatang, tumbuhan dan manusia. Ancaman berikutnya adalah kerawanan pangan sebagai akibat kelangkaan air dan pencemaran tanah merubah pola produksi pangan.

Pembangunan ekonomi lewat strategi industrialisasi disatu pihak dapat meningkatkan kesejahteraan manusia karena meningkatnya jumlah produksi barang dan jasa, sedangkan di pihak lain terdapat penurunan kesejahteraan manusia karena adanya pencemaran lingkungan dan menipisnya ketersediaan sumberdaya alam. Maka yang perlu dikhawatirkan bahwa pembangunan itu sendiri pada suatu saat akan mengalami stagnasi karena tidak ada lagi sumber daya alam yang dapat digali, atau sumberdaya alam yang ada semakin buruk kualitasnya, sehingga memerlukan biaya produksi yang tinggi untuk menghasilkannya. Oleh karena itu untuk menjamin adanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, harus dicari titik keseimbangan antara kebijakan pembangunan dan kebijakan lingkungan, sehingga akan tercapai kebijakan pembangunan ekonomi yang menjamin peningkatan kesejahteraan

manusia dalam jangka panjang dengan pembangunan berkelanjutan.

### Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Ide tentang pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) berakar pada pemikiran untuk mengintegrasikan ekonomi dan ekologi. Ide ini merupakan paradigma baru yang mulai diterjemahkan dalam berbagai konsep. Sejak pertemuan Stockholm tahun 1972 mengenai *Human Environment*, isu mengenai lingkungan berkembang pesat mempengaruhi pergeseran paradigma pembangunan yang dianut oleh negara maju yang semula sangat mengutamakan pertumbuhan ekonomi kemudian bergeser menuju peningkatan kualitas hidup melalui pembangunan berwawasan lingkungan.

Hingga saat ini telah banyak pakar yang mendefinisikan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang masing-masing mempunyai arti dan tujuan sendiri. Mereka menggunakan konsep ini untuk maksud dan tujuan berbeda-beda, yang dipengaruhi kondisi pembangunan maupun kepentingan suatu negara dan kelompok tertentu seperti jaringan bisnis dan komunitas lokal, sebagian menekankan pembangunan melalui pertumbuhan ekonomi, sedangkan lainnya menekankan *sustainability* melalui perlindungan lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan ini menurut Colby dalam Baiquni (2003: 209) adalah pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hari ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang



akan datang dalam memenuhi kebutuhannya. Kegiatan pembangunan baik itu ekonomi maupun sosial budaya, merupakan hubungan atau interaksi antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Walhi (2004: 17) menyatakan pembangunan berkelanjutan adalah perbaikan mutu kehidupan manusia dengan tetap berusaha tidak melampaui kemampuan ekosistem pendukungnya. Pembangunan berkelanjutan menurut Satriago dalam Baiquni (2003: 207) adalah sebagai adopsi strategi-strategi bisnis dan aktivitas yang mempertemukan kebutuhan-kebutuhan perusahaan dan stakeholder pada saat ini dengan cara melindungi, memberlanjutkan serta meningkatkan sumberdaya manusia dan alam yang akan dibutuhkan pada masa mendatang. Berkait dengan hal tersebut Chafid dalam Baiquni (2007: 17) mengatakan pembangunan berkelanjutan atau "*sustainable development*" adalah kegiatan pembangunan yang menjaga mutu lingkungan agar proses sistem dalam ekonomi sosial tetap terjadi secara berkelanjutan dalam keterkaitan, keaneka ragaman, kelestarian, berkeadilan memperhatikan kelayakan sumberdaya alam, serasi dan seimbang. Pembangunan Berkelanjutan yang diperbincangkan oleh banyak kalangan, menurut Burger dalam Baiquni, (2003: 211) setidaknya membahas empat hal: 1) Upaya memenuhi kebutuhan manusia yang ditopang dengan kemampuan daya dukung ekosistem; 2) Upaya peningkatan mutu kehidupan manusia dengan cara melindungi dan memberlanjutkan; 3) Upaya meningkatkan sumberdaya

manusia dan alam yang akan dibutuhkan pada masa yang datang; 4) Upaya mempertemukan kebutuhan-kebutuhan manusia secara antar generasi. Menurut pandangan penulis pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia kini dan masa depan yang meliputi kegiatan pembangunan ekonomi, sosial budaya dan pengelolaan lingkungan. Karena itu hak-hak asasi manusia seperti hak ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup sehat dan hak atas pembangunan menjadi kebutuhan mendesak sebagai hak asasi manusia untuk mewujudkan kesejahteraan.

Dari paparan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan mencakup tiga aspek penting yaitu: pembangunan ekonomi, kesejahteraan dan keadilan sosial, serta pelestarian lingkungan hidup; 3) Aspek tersebut tidak dapat dipisahkan dan saling terkait untuk satu tujuan yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada generasi berikutnya untuk menjalankan kehidupannya. Pembangunan ekonomi tidak dapat dilaksanakan jika tidak ada masyarakat yang melakukan dan tidak memberikan manfaat kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut Flint & Floser dalam Marsono (2008:4) menyebutkan bahwa kehidupan manusia pada dasarnya sangat bergantung sekali kepada sumberdaya alam seperti air, udara, tanah, tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu sumberdaya alam harus dilindungi agar kehidupan masa kini dan mendatang dapat dipertahankan. Dengan peren-

canaan kehidupan yang berkelanjutan, maka setiap orang akan dapat menikmati hidup layak tanpa harus membahayakan masa depan anak cucu. Pembangunan berkelanjutan memerlukan proses integrasi ekonomi dan ekologi yang bertumpu pada kemitraan dan partisipasi para pelaku pembangunan dalam mengelola sumberdaya seoptimal mungkin dapat dimanfaatkan dan mengusahakan agar hasil pembangunan terbagi merata dengan adil pada berbagai kelompok dan lapisan masyarakat serta antar generasi. Proses pembangunan haruslah memajukan martabat manusia dan tujuan setiap pembangunan adalah demi kemajuan yang terus menerus secara berkelanjutan untuk kesejahteraan manusia secara adil dan merata.

### **Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan**

Pergeseran pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan dirasakan sangat perlu dewasa ini, mengingat pertimbangan-pertimbangan bahwa pembangunan merupakan kehendak menuju transformasi sosial serta perbaikan kesejahteraan ekonomi yang bertumpu pada martabat manusia. Untuk menuju masyarakat yang berkelanjutan, masyarakat harus hidup dengan berbagai prinsip dasar pembangunan berkelanjutan meliputi: 1) *pemerataan dan keadilan sosial*, pembangunan berkelanjutan harus menjamin adanya pemerataan untuk generasi sekarang dan yang akan datang berupa pemerataan distribusi sumber-

daya alam, faktor produksi dan ekonomi yang berkeseimbangan (adil), berupa kesejahteraan semua lapisan masyarakat; 2) *menghargai keanekaragaman (diversity)*, keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya perlu dijaga Keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumberdaya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan yang akan datang. Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti oleh masyarakat; 3) *menggunakan pendekatan integratif*, pembangunan berkelanjutan menggunakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia memengaruhi alam dengan cara memanfaatkan. Karena itu, pemanfaatan harus didasarkan pada pemahaman akan kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial dengan cara-cara yang lebih integratif dalam pelaksanaan pembangunan; 4) *perspektif jangka panjang*, dalam hal ini pembangunan berkelanjutan sering kali diabaikan, karena masyarakat cenderung menilai masa kini lebih utama dari masa akan datang. Karena itu persepsi semacam itu perlu diubah.

Sementara Emil Salim dalam Arif (2000:242) menjelaskan bahwa prinsip dasar pembangunan berkelanjutan bertumpu pada: 1), bahwa proses pembangunan harus berlangsung secara terus menerus, serta didukung *ketersediaan* sumber daya alam, manusia dan kualitas lingkungan yang berkembang secara ber-

lanjut; 2), bahwa sumberdaya alam, terutama udara, air dan tanah adalah sesuatu yang memiliki ambang batas. Penggunaannya jelas berpengaruh dalam meminimalkan kuantitas dan kualitasnya. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan berarti juga penerapan cara yang efisien dan efektif pada pemanfaatan sumberdaya, sehingga pembangunan pada tahapan berikutnya tidak mengalami kekosongan atas ketersediaannya; 3), bahwa kualitas lingkungan berkorelasi dengan kualitas hidup. Semakin baik kualitas lingkungan, semakin positif pengaruhnya bagi kualitas hidup. Pembangunan berkelanjutan menempatkan pengembangan kualitas lingkungan sebagai hal penting yang bisa memberikan kontribusi positif pada kualitas hidup manusia; 4) bahwa pembangunan berkelanjutan mengandung pengertian bahwa penggunaan sumberdaya alam masa kini harus mempertimbangkan kepentingan masa depan. Pola penggunaan sumberdaya alam tidak menutup kemungkinan memilih opsi lain masa depan. Dengan begitu, 5) pembangunan berkelanjutan bisa didefinisikan sebagai solidaritas trans-generasi yang memungkinkan generasi sekarang meningkatkan kesejahteraan tanpa mengurangi jaminan bagi generasi mendatang untuk membangun kesejahteraan mereka.

### **Pembangunan Masyarakat yang Berkelanjutan di Indonesia**

Keberhasilan paradigma pertumbuhan mencapai pertumbuhan ekonomi

yang tinggi pada masa Orde Baru telah membawa berbagai akibat yang negatif. Momentum pembangunan dicapai dengan pengorbanan (*at the expense of*) deteriorasi ekologis, penyusutan sumber alam, timbulnya kesenjangan sosial dan dependensi antara rakyat dan proyek pembangunan atau antara rakyat dan birokrat. Karenanya sifatnya menjadi *disempowering*, menekan kemampuan masyarakat untuk mengaktualisasikan potensinya, yang akibat selanjutnya dapat menurunkan derajat keberlanjutan pembangunan. Maka suatu pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang menjadi tren utama wacana pembangunan di dunia kini bisa menemukan realisasinya dalam pembangunan di Indonesia pasca Orde Baru.

Sejak tahun 1992 Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan UU No 23 Tahun 1997 mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (UULH No 23/1997). Dalam butir b Menimbang UU No 23/1997 "bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan *kesejahteraan* umum seperti diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan

yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu menyeluruh dengan memperhitungkan keutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan dilakukan untuk mentransformasikan sumberdaya alam yang tidak terbarukan menjadi sumber daya terbarukan, terutama pemberdayaan sumber daya manusia sebagai *agent* pembangunan berkelanjutan

Berkaitan dengan pembangunan dalam butir b UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, *peran serta masyarakat*. Masyarakat mempunyai peran sentral dalam pembangunan sehingga akan membantu terciptanya *good governance*. Melalui otonomi, Pemerintah Daerah mempunyai peluang yang lebih besar untuk mendorong dan memberi motivasi membangun daerah yang kondusif, sehingga akan muncul kreasi dan daya inovasi masyarakat. Agyeman dalam Marsono (2008: 3) menegaskan bahwa masyarakat mempunyai dua fungsi yaitu sebagai *policy makers* dan *policy-consumers* yang memungkinkan menjadi pusat perhatian bagi kegiatan pembangunan daerah. Masyarakat juga perlu melibatkan kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) agar dapat membantu melaksanakan fungsinya. Dengan fungsi yang dimiliki diharapkan masyarakat mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan dan

secara setara berdiri sejajar dan proporsional dalam berhubungan atau berinteraksi dengan pihak luar, termasuk dengan perusahaan-perusahaan di sekitarnya.

Upaya untuk menunjang kemampuan masyarakat agar tumbuh secara berkelanjutan sedikitnya ada enam faktor yang penting dikembangkan yakni: a) Motivasi; b) Keyakinan Diri; c) Kemampuan Evaluasi diri; d) Kreativitas; e) Pengalaman-pengalaman positif; dan f) Keswadayaan mereka (Maksum M, dkk. 2002:5). Faktor-faktor tersebut menjadi kekuatan dasar yang saling kait mengkait dan berfungsi mendukung kehidupan berkelanjutan dan perkembangan masyarakat. Pembangunan berkelanjutan harus diletakkan sebagai kebutuhan dan aspirasi manusia masa kini dan masa depan. Karena itu hak-hak asasi manusia seperti hak ekonomi, sosial, budaya, dan hak atas pembangunan dapat membantu memperjelas arah dan orientasi perumusan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Hak manusia atas lingkungan hidup yang sehat dan baik menjadi kebutuhan mendesak sebagai bagian hak asasi manusia. Hak atas pembangunan tidak terlepas dari ketentuan bahwa proses pembangunan adalah demi kemajuan yang terus menerus secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Sehubungan dengan hal tersebut Samekto (2005: 86) menyatakan berkelanjutannya pembangunan membutuhkan pencapaian berbagai hal yang meliputi: 1) berkelanjutan ekologis; yang akan menjamin berkelanjutan eksistensi

bumi dengan memelihara (mempertahankan) integrasi tatanan lingkungan dan keanekaragaman hayati; 2) berkelanjutan ekonomi yakni ekonomi makro dan ekonomi sektoral. Berkelanjutan ekonomi makro, menjamin ekonomi secara berkelanjutan dan mendorong efisiensi ekonomi melalui reformasi struktural dan nasional. Berkelanjutan ekonomi sektoral dengan menghitung nilai ekonomi sumberdaya alam yang harus diperlakukan sebagai kapital yang *"tangible"* dalam rangka akunting ekonomi. Secara prinsip harga sumberdaya alam harus merefleksikan biaya pengiriman, biaya lingkungan dan biaya pemanfaatan. 3) berkelanjutan sosial budaya, meliputi stabilitas penduduk, pemenuhan kebutuhan dasar, mempertahankan kebudayaan dan mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. 4) berkelanjutan politik, tujuan yang ingin dicapai adalah kebebasan individu dan sosial untuk berpartisipasi di bidang ekonomi, sosial dan politik serta proses demokrasi secara transparan dan bertanggung jawab. 5) berkelanjutan pertahanan dan keamanan, yaitu keberlanjutan menghadapi tantangan dan mengatasi tantangan, ancaman dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar yang dapat membahayakan integrasi, identitas, kelangsungan bangsa dan negara.

Untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dibutuhkan pendekatan ekosistem dengan melihat interdependensi dari setiap ekosistem. Agar keberlanjutan tetap terjaga harus ada komitmen setiap penyangga kehidupan dan campur tangan

pemerintah dengan melibatkan lembaga swadaya masyarakat serta dunia usaha. Dunia usaha yang selama ini dituduh sebagai pelaku kerusakan dan pencemaran harus dipahamkan akan tanggungjawabnya dengan membayar kompensasi jasa lingkungan yang dapat digunakan untuk membiayai pemulihan lingkungan yang rusak dan tercemar.

Kementerian Lingkungan Hidup dalam Absori (2006 :46) menyatakan sebagai tindak lanjut dari implementasi pembangunan berkelanjutan, pemerintah Indonesia telah memprakarsai melakukan Kesepakatan Nasional dan Rencana Tindak Pembangunan berkelanjutan yang berisi: 1) Komitmen bagi pelaksanaan dan pencapaian pembangunan berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundangan dan sejalan dengan komitmen global; 2) Perlu keseimbangan tiga pilar pembangunan berkelanjutan (ekonomi, sosial dan lingkungan) serta saling ketergantungan dan memperkuat; 3) Penanggulangan kemiskinan, perubahan pola produksi dan konsumsi serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan; 4) Peningkatan kemandirian nasional; 5) Penegasan bahwa keragaman sumberdaya alam dan budaya sebagai modal pembangunan dan perekat bangsa; 6) Perlunya melanjutkan reformasi sebagai prakon-disi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan; 7) Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, pengelolaan sumberdaya alam, pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan dan pembangunan kelembagaan merupakan di-



mensi utama keberhasilan pembangunan berkelanjutan; 8) Perwujudan rencana pelaksanaan pembangunan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat khususnya perempuan, anak-anak dan kaum rentan; 9) Perwujudan sumberdaya manusia terdidik untuk dapat memahami dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan; 10) Pengintegrasian prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam strategi dan program pembangunan nasional.

Berkait dengan hal tersebut, Emil Salim (1987: 6) menyatakan bahwa penjabaran dan implementasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia ditujukan pada beberapa sasaran, yakni: 1) membina hubungan keselarasan manusia dengan lingkungannya; 2) melestarikan sumberdaya alam agar bisa dimanfaatkan secara terus menerus oleh generasi demi generasi sampai generasi tak terhingga; 3) mencegah kemerosotan mutu dan meningkatkan mutu lingkungan sehingga dapat menaikkan kualitas hidup manusia Indonesia; 4) membimbing manusia dari perusak lingkungan menjadi pembina lingkungan. Disini pembangunan berkelanjutan tidak terbatas pada pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan, tetapi juga berarti berkelanjutan sosial dan ketahanan kekuatan sosial. Meskipun Indonesia telah merumuskan agenda 21, tetapi realitas implementasinya banyak menghadapi kendala, tidak hanya pada persoalan teknis perencanaan kebijakan dan program pembangunan itu sendiri, justru yang paling mendasar adalah persoalan manusia yang tercermin pada

kepemimpinan di segenap lapisan.

Dalam implementasinya kesepakatan nasional dan rencana tindak pembangunan berkelanjutan banyak menghadapi berbagai masalah antara lain: 1) Pendekatan pembangunan yang dilakukan selama ini amat pragmatis dan terlalu berorientasi pada pembangunan ekonomi, padahal persoalan pembangunan ekonomi tidak terlepas dari pembangunan sosial dan lingkungan; 2) Penggunaan sumberdaya alam yang hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan produk untuk memasok pasar, sehingga eksploitasi sumberdaya alam tidak terkendali; dan 3) Pemisahan yang amat kentara dalam pengambilan keputusan kebijakan pembangunan di bidang investasi, keuangan, perdagangan dan teknologi dengan lingkungan hidup, sehingga kondisi lingkungan hidup semakin rusak. Dengan bertitik tolak pada masalah yang dihadapi dalam implementasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia, maka perlu dicari strategi agar pembangunan berkelanjutan dapat dilaksanakan secara terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup berjangka panjang dengan memperhatikan potensi sumber daya dan budaya lokal.

### **Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan**

Berakhirnya paradigma pemerintah dari sentralistik ke desentralistik, ditandai dengan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam UU No. 22/1999 kemudian diganti dengan UU No. 32/2004

membawa perubahan sistem tata kelola yang penting dalam sejarah pembangunan. Dalam undang-undang ditegaskan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi keadilan dan pemerataan, pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara efektif dan efisien, bertanggung jawab, transparan, terbuka untuk kemakmuran masyarakat. Pembangunan saat ini dilaksanakan melalui Program Pembangunan Nasional (Propenas) yang mengandung tiga pilar pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial budaya dan pengelolaan lingkungan.

Pada era otonomi ini pembangunan menitikberatkan pada partisipasi masyarakat, berorientasi kebutuhan, keswadayaan, peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Desentralisasi merupakan pendekatan yang baik untuk pembangunan berkelanjutan, karena membuka pintu lebih lebar bagi partisipasi masyarakat diwilayahnya sendiri, sehingga masyarakat mempunyai peran sentral untuk membantu terciptanya *good governance* dengan selalu aktif memantau pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, memastikan keadilan sosial dan terwujudnya pelestarian lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan dilakukan untuk mentransformasikan pemberdayaan sumber daya manusia sebagai agen pembangunan berkelanjutan guna mewujudkan satu tujuan yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada generasi berikutnya untuk menjalankan kehidupan. Untuk menuju masyarakat yang

berkelanjutan masyarakat harus hidup dengan berorientasi kepada: 1) *Menghormati dan memelihara komunitas kehidupan*, dalam melakukan pembangunan kita harus membagi dengan adil baik manfaat maupun biaya pelestarian tanpa mengorbankan generasi kemudian; 2) *Memperbaiki kualitas hidup manusia*, dalam proses pembangunan diharapkan manusia menyadari potensinya, mempunyai rasa percaya diri, bermartabat dan berkecukupan. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh berkembang tanpa batas, pembangunan yang berhasil hanya bila dapat membuat hidup menjadi lebih baik dalam berbagai segi; 3) *Melestarian daya hidup dan keragaman bumi*, dengan melindungi struktur, fungsi dan keragaman spesies, hayati, satwa serta mencegah pencemaran; 4) *Menghindari sumber daya yang tak terbarukan* seperti, mineral, minyak, gas dan batu bara sehingga “umur” mereka bisa diperpanjang demi kehidupan bagi semua orang; 5) *Tidak melampaui kapasitas daya dukung*, “ekosistem” bumi mempunyai batas batas tertentu yang bervariasi antar daerah. Guna meningkatkan mutu kehidupan manusia tindakan yang dilakukan dengan mengelola sumber alam secara berkelanjutan dengan mengkonsumsi sumberdaya secara terpadu, seimbang dan pengelolaan masalah kependudukan agar kebutuhan penduduk sesuai dengan kapasitas alam; 6) *Mengubah sikap dan gaya hidup*, mengkaji dan menyebarkan nilai-nilai positif melalui sosialisasi nilai hidup berkelanjutan dan mengubah sikap hidup pemborosan;

7) *Mendukung masyarakat memelihara lingkungan sendiri*, memberikan hak kepada masyarakat untuk mengendalikan kehidupannya, termasuk mengakses dan mengelola sumber daya yang mereka butuhkan. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memecahkan permasalahan, mengembangkan teknologi berwawasan lingkungan yang sesuai kondisi, bermanfaat dan mudah diperbaiki; 8) *Membangun kerja sama baik dalam skala lokal*, nasional maupun global, kerja sama yang kuat harus terjalin diantara semua masyarakat, bangsa dan negara. Lingkungan menjadikan semua bangsa di dunia terjalin saling terkait karena pencemaran, polusi, pemanasan global dan tidak mengenal suku, agama, ras, bangsa dan negara karena semua bisa bergerak bersama arus udara dan aliran air. Hal tersebut di atas mencerminkan nilai-nilai dan pesan-pesan tentang kepedulian pada sesama, kepedulian terhadap alam dan pelestarian alam yang semua itu penting guna mendukung kelangsungan hidup manusia secara berkelanjutan.

### **Strategi Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan bukanlah situasi harmonis yang tetap dan statis, melainkan merupakan suatu proses perubahan yang eksploitasi sumber alam, arah investasinya, orientasi perkembangan teknologinya dan pengembangan kelembagaannya konsisten dengan pemenuhan kebutuhan pada saat ini dan

masa depan. Agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia, disusun sebagai upaya mengelola agar pembangunan ekonomi Indonesia berlangsung secara berkelanjutan, untuk itu dibutuhkan serangkaian strategi integrasi lingkungan ke dalam pembangunan ekonomi. Strategi integrasi tersebut meliputi: 1) Pengembangan pendekatan ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan; 2) Pengembangan pendekatan pencegahan pencemaran; 3) Pengembangan sistem neraca ekonomi, sumberdaya alam dan lingkungan. Strategi 1) menunjukkan upaya integrasi ekonomi dan ekologi dalam pengelolaan sumberdaya alam. Strategi tersebut berupaya mempengaruhi keadaan ekonomi yang ada saat ini menjadi ekonomi berkelanjutan. Ekonomi berkelanjutan didefinisikan sebagai “ekonomi yang tetap memelihara basis sumberdaya alam yang digunakan. Tata ekonomi seperti ini dapat terus berkembang dengan penyesuaian-penyediaan, dan dengan menyempurkan pengetahuan, organisasi, efisiensi teknik, dan kebijakan pembangunan berkelanjutan perlu proses integrasi ekonomi dan ekologi melalui upaya perumusan paradigma dan arah kebijakan yang bertumpu pada kemitraan dan partisipasi para pelaku pembangunan dalam mengelola sumberdaya yang seoptimal mungkin dan dimanfaatkan. Dasar pemikiran ini membuka peluang untuk membuka tiga isu strategis yaitu Trilogi Pembangunan, dengan memodifikasi urutan prioritas dan mengubah salah satu logi dari paradigma stabilitas men-

jadi sustainabilitas. Trilogi yang diusulkan adalah pemerataan, pertumbuhan dan sustainabilitas.”

Berdasarkan pengertian bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan ramah lingkungan yang tidak merusak lingkungan hidup, sekaligus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan tingkat kehidupan masyarakat di Indonesia, kebijakan-kebijakan pemerintah harus berpihak pada pembangunan berkelanjutan. Agar pembangunan berkelanjutan dapat dilaksanakan maka diperlukan strategi sebagai berikut: 1) Suatu sistem politik yang menjamin partisipasi efektif warga negara dalam pembuatan keputusan; 2) Suatu sistem ekonomi yang mampu menghasilkan surplus dan dapat mengembangkan pengetahuan teknik secara mandiri dan berkelanjutan; 3) Suatu sistem sosial yang mampu mengatasi semua hambatan dan tantangan yang timbul karena pembangunan; 4) Suatu sistem produksi yang menghargai kewajiban untuk mempertahankan suatu basis ekologi pembangunan; 5) Suatu sistem administrasi yang selalu dinamis, mampu menyesuaikan diri dengan fungsi yang terus berubah serta memiliki kapasitas untuk mengoreksi diri sendiri; 6), suatu sistem internasional yang mendorong tumbuhnya pola perdagangan dan keuangan yang berkelanjutan.

Pembangunan manusia dan pelestarian lingkungan harus dipadukan untuk membentuk masyarakat yang berkelanjutan. Kepedulian terhadap alam dan persamaan hak dalam pembangunan

berkelanjutan dan pelestarian lingkungan sangat penting guna mendukung kelangsungan hidup manusia. Dengan perencanaan kehidupan yang berkelanjutan, maka setiap orang akan dapat menikmati hidup layak tanpa harus membahayakan masa depan anak cucu. Pembangunan berkelanjutan memerlukan proses integrasi ekonomi dan ekologi yang bertumpu pada kemitraan dan partisipasi para pelaku pembangunan dalam mengelola sumberdaya seoptimal mungkin dapat dimanfaatkan dan mengusahakan agar hasil pembangunan terbagi merata dengan adil pada berbagai kelompok dan lapisan masyarakat serta antar generasi. Proses pembangunan haruslah memajukan martabat manusia dan tujuan setiap pembangunan adalah demi kemajuan yang terus menerus secara berkelanjutan untuk kesejahteraan manusia secara adil dan merata.

### **Simpulan**

Orientasi pembangunan selama era Orde Baru lebih menekankan pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto memang telah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tetapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum menjamin terjadinya kemandirian yang lebih tinggi sebagai bangsa. Oleh karena itu untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu menyeluruh dengan memper-

hitungkan keutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan dilakukan untuk mentransformasikan sumberdaya alam yang tidak terbarukan menjadi sumber daya terbarukan, terutama pemberdayaan sumber daya manusia sebagai *agent* pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini hak-hak asasi manusia seperti hak ekonomi, sosial, budaya dan hak atas pembangunan akan memperjelas orientasi pembangunan berkelanjutan.

Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, *peran serta masyarakat*. Masyarakat mempunyai peran sentral dalam pembangunan sehingga akan membantu terciptanya *good governance*. Melalui otonomi, Pemerintah Daerah mempunyai peluang yang lebih besar untuk mendorong dan memberi motivasi membangun daerah yang kondusif, sehingga akan muncul kreasi dan daya inovasi masyarakat untuk menentukan dirinya sendiri dan meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.

Pembangunan manusia dan pelestarian lingkungan hidup harus dipadukan untuk membentuk masyarakat yang berkelanjutan. Kepedulian terhadap alam dan persamaan hak dalam pembangunan sangat penting guna mendukung keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan wawasan lingkungan hidup perlu terus diusahakan demi perluasan dimensi pembangunan itu sendiri.

## Daftar Pustaka

- Absori, 2006. Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta. Volume 9 Nomer 1.
- Aminudin, dkk. 2006. *Tambang dan Penghancuran Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Jatam
- Aminudin, dkk. 2007. *Tambang dan Pelanggaran HAM*. Jakarta: Penerbit Jatam.
- Arif, Sritua. 2000. *Pembangunan dan Ekonomi Indonesia: Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi*. Bandung: Zaman Wacana Mulia.
- Baiquni. 2003. *Pembangunan yang tidak Berkelanjutan*. Yogyakarta: Penerbit Trans Media Global Wacana.
- Baiquni. 2007. *Strategi penghidupan di Masa Krisis. Belajar dari Desa*. Yogyakarta: Ideas Media.
- Chafid F. 1995. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Prinsip Dasar Dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Dirjen Geologi & SDMineral. 2002. *Pengembangan Masyarakat pada Usaha Pertambangan*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Fakih Mansour. 2002. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maksum, dkk. 2002. *Strategi Peningkatan Kualitas masyarakat Daerah*.



- rah. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Marsono Harry. 2008. *Pemberdayaan Masyarakat Yang Berkelanjutan Di Daerah Tambang*. Yogyakarta.
- Salim Emil. 1987. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES
- Samekto Aji. 2005. *Kapitalisme, Modernisasi dan Kerusakan Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soemarwoto Otto. 2004. *Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press.
- Sumarjono. 2005. Pendampingan Suatu Alternatif Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Lokasi Tambang. *Jurnal Ilmu Sosial Alternatif STPMD "APMD"*, Yogyakarta Volume VI Nomer 11.
- Syahrin Alvi. 2005. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum* Volume 01 Nomor 01.
- Tjokrowinoto M .1999. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Walhi, 2004. *Bumi Wahana. Strategi Menuju Kehidupan yang Berkelanjutan*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Sumber Lain**
- Surat Kabar Harian *Kompas*, Lestarkan Lingkungan Demi Generasi Penerus Bangsa. Jakarta, 8 Juni 2010.
- Surat Kabar Harian *Kompas*, Bencana lingkungan Akibat Ulah Manusia dan Iklim. Jakarta, 4 Mei 2011.
- \_\_\_\_\_ Undang-undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- \_\_\_\_\_ Undang-undang no 23 tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan hidup.
- \_\_\_\_\_ Undang-undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- \_\_\_\_\_ Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.